

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Wibisono (dalam Kirana, 2009) mengartikan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh Wibisono (dalam Kirana, 2009), yang menyatakan bahwa yang dimaksud *stakeholder* adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, asosiasi perdagangan dan lainnya.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000 dalam



Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ullman 1982, dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

2.1.2 Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan secara sederhana didefinisikan sebagai penyampaian informasi (*the release of information*). Tujuan pengungkapan menurut *Securities Exchange Commission* (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu: 1) *protective disclosure*, dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) *informative disclosure*, bertujuan untuk memberikan informasi layak kepada pengguna laporan (Utomo, 2000). Belkaoui (2000) mengemukakan tujuan pengungkapan ada enam, yaitu:

1. Menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
2. Menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Menyediakan informasi yang membantu investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
4. Menyediakan informasi yang penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.
5. Menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang.
6. Membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.

Banyaknya informasi yang harus diungkapkan tidak hanya bergantung pada pembaca, tetapi juga sesuai dengan standar yang ada (Hendriksen, 2002). Tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan adalah:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate*), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. Pengungkapan wajar (*fair*) yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. Pengungkapan lengkap (*full*) menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan dengan relevan dan memberi kesan penyajian yang melimpah.

Konsep pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*) merupakan konsep pengungkapan yang paling umum digunakan dari ketiga konsep lainnya (Ghozali dan Chariri, 2007). Laporan keuangan menjadi suatu mekanisme yang penting karena merupakan alat komunikasi bagi manajer dengan pihak lain di luar perusahaan di luar perusahaan seperti investor, kreditur dan pengguna informasi lainnya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*). *Mandatory* yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, sedangkan sukarela (*voluntary*) merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu) (Nurlela dan Islahudin, 2008). Oleh karena itu, perusahaan

memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh perusahaan yang dikelola oleh manajer yang memiliki pandangan filosofi manajerial yang berbeda dan keluasan yang berkaitan dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Dengan mengkomunikasikan CSR-nya, makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat resiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. Jadi, melaporkan CSR kepada khalayak akan meningkatkan nilai *social hedging* perusahaan.

Semakin banyak peraturan yang harus diataati oleh perusahaan maka semakin luas pula pengungkapan yang harus dilakukan terkait pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Belum lama ini Bapepam LK mengeluarkan keputusan No. 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Dibanding aturan yang lama (SK Bapepam No. 38/PM/1996) jumlah informasi yang wajib diungkapkan, khususnya yang terkait dengan praktek *Corporate Governance*, jauh lebih banyak. Pada tahun 2007, DPR juga telah mengesahkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya informasi operasional perusahaan yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan CSR.

2.1.3 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Sejak tanggal 23 September 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) mulai diwajibkan melalui UU

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam. Dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) yang sukarela, namun pengungkapan yang wajib hukumnya. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan yang harus diungkapkan atau disyaratkan oleh standart akuntansi yang berlaku (kewajiban perusahaan). Sedangkan penungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pengungkapan program CSR di Indonesia telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.47/2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas”. Peraturan ini untuk melengkapi peraturan yang tidak diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 (1). Pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur pelaksanaannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2012) paragraf 15 yang secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial. “Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan mengenai nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tersebut diluar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”. Dalam proses pelaporan, ada beberapa standar pelaporan yang sudah dikenal untuk mengimplementasikan CSR. Terdapat standar pelaporan dari *Global Reporting Initiative (GRI)*.

GRI merupakan sebuah organisasi independen yang telah mempelopori pengembangan keberlanjutan dunia dan berkomitmen untuk terus menerus

melakukan perbaikan dan penerapan diseluruh dunia. Indikator GRI G4 (*globalreporting.org*) yaitu :

1. Indikator kinerja ekonomi.
2. Indikator kinerja lingkungan.
3. Indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja
4. Indikator Hak Asasi Manusia
5. Indikator masyarakat
6. Indikator tanggung jawab atas produk

Dalam hal ketenagakerjaan, aspek yang dinilai yaitu pekerjaan, tenaga kerja/hubungan manajemen, kesehatan dan keselamatan jabatan, pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesempatan setara. Aspek dalam hak asasi manusia meliputi aspek praktek investasi dan pengadaan, aspek nondiskriminasi, aspek kebebasan berserikat, berunding dan berkumpul bersama, aspek pekerja anak, aspek kerja paksa dan kerja wajib, aspek praktik/tindakan pengamanan dan aspek hak penduduk asli. Sedangkan masyarakat terdiri dari aspek komunitas, korupsi, kebijakan publik, kelakuan tidak bersaing dan aspek kepatuhan. Dalam hal tanggung jawab produk, aspek yang dinilai yaitu aspek kesehatan dan keamanan pelanggan, aspek pemasangan label bagi produk dan jasa, aspek komunikasi pemasaran, aspek keleluasaan pribadi pelanggan dan aspek kepatuhan.

Ada berbagai motivasi bagi para manjer untuk sukarela melakukan kegiatan seperti memutuskan untuk melaporkan informasi sosial dan lingkungan. Deegan (2002) dalam Fahrizki (2010) dalam penelitiannya merangkum beberapa alasan yang dikemukakan oleh berbagai peneliti untuk melaporkan informasi sosial dan lingkungan, antara lain :

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam Undang-Undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.

4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan pinjaman.
5. Untuk memenuhi harapan masyarakat, mungkin mencerminkan suatu pandangan yang sesuai dengan “komunitas lisensi untuk beroperasi”.

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

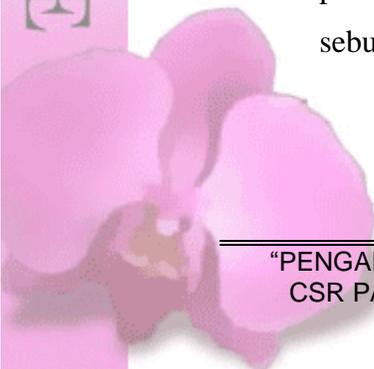
Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah *size*, profitabilitas dan *leverage*. Berikut ini akan dibahas pengertian dari masing-masing variabel.

2.1.4.1 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Suwito dan Herawati (2005:) mengatakan *firm size* atau ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, dimana ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*largefirm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin luas pengungkapan informasi yang akan disajikan karena masyarakat akan mengawasi terkait hal-hal yang dilakukan perusahaan dalam aktivitas perusahaan. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001).

Menurut Sartono (2010) *size* menunjukkan total kekayaan yang dimiliki perusahaan, melalui ukuran kekayaan tersebut dapat menentukan ukuran sebuah perusahaan. Untuk mengukur *size* perusahaan maka digunakan total



assets yang ditransformasikan dengan menggunakan *Logaritma Natural* (LN) atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log N (Total Aset)}$$

Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wijaya (2013) mengemukakan bahwa pengukuran variabel ukuran perusahaan berdasarkan total aktiva. Menurut Jogiyanto (2007:282) menyatakan ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Nilai total aset biasanya bernilai sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, untuk itu variabel aset diperhalus menjadi Log Aset atau Ln Total Aset.

Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kebutuhan dana yang besar, dan salah satu alternatif pemenuhan dana yang tersedia adalah dengan pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal dapat diperoleh dengan penerbitan saham, obligasi, maupun hutang. Sehingga, dalam rangka pemenuhan pendanaan eksternal tersebut perusahaan akan lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan perusahaan (Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wijaya, 2013).

2.1.4.2 Profitabilitas

Menurut Sartono (2010), profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan, oleh sebab itu semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka cenderung semakin luas *Corporate Social Responsibility*. Dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba yang semakin besar akan membuat

perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Untuk mengukur profitabilitas didalam penelitian ini digunakan *return on assets*. Rasio tesebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan segala sumber dana yang berasal dari aset. Untuk mencari nilai *return on assets* dapat digunakan rumus sebagai berikut (Sartono, 2010) yaitu:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan *Return on Asset (ROA)* sebagai alat ukur profitabilitas perusahaan karena rasio ini dapat mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada sejumlah aset tertentu.

2.1.4.3 Leverage

Menurut Sartono (2010) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber dana baik yang berasal dari kekayaan perusahaan atau pun bersumber dari hutang. *Leverage* menunjukkan kualitas layanan kewajiban perusahaan. Variabel ini menjelaskan seberapa besar rasio antara total kewajiban dengan total modal perusahaan. Perjanjian terbatas seperti perjanjian hutang yang tergambar dalam tingkat *leverage* dimaksudkan membatasi kemampuan manajemen untuk menciptakan transfer kekayaan antar pemegang saham dan pemegang obligasi (Fachry Maulana, 2013). Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* (utang/ekuitas) yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan pemegang saham terhadap dipenuhinya hak-hak

mereka sebagai kreditur. Kreditur memerlukan pengungkapan CSR sebagai informasi untuk mengevaluasi risiko secara benar.

Untuk mengukur *leverage* maka digunakan *debt to equity ratio* yang dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal}}$$

Debt To Equity Ratio (DER) yang semakin besar menunjukkan bahwa struktur modal yang berasal dari utang semakin besar digunakan untuk mendanai ekuitas yang ada. Pada umumnya investor berminat pada perusahaan dengan *leverage* tinggi karena memungkinkan pengembalian terhadap modal sendiri yang lebih tinggi jika perusahaan mendapatkan keuntungan, tetapi hal ini juga berarti bertambahnya tingkat resiko finansial bagi investor. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi *return* saham.

Debt To Equity Ratio atau yang umum disingkat dengan DER, merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang yang ada dengan menggunakan modal/ekuitas yang ada, semakin tinggi nilai ini tentunya semakin berisiko keuangan perusahaan tersebut, nilai DER umumnya maksimal adalah 150% dan untuk perusahaan *multifinance* adalah 600%.

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur nilai DER, antara lain perbandingan antara komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas, dengan persamaan sebagai berikut:

1. *Short Term Debt to Equity Rasio* adalah hutang kepada *supplier* dan hutang kepada bank dengan durasi maksimal satu tahun.

2. *Long Term Debt to Equity Ratio* adalah hutang kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi, hutang bank dengan durasi lebih dari satu tahun.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *size*, profitabilitas dan *leverage* keuangan terhadap pengungkapan CSR perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia secara simultan dan parsial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari objek dan tahun pengambilan sampel. Selain itu untuk memperoleh hasil yang lebih akurat maka variabel yang dipakai akan diuji secara simultan maupun parsial. Dari segi objek penelitian menggunakan sampel perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara dan laporan keuangan perusahaan terbaru selama 3 tahun berturut-turut yakni BEI tahun 2015-2017. Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang secara langsung mengambil hasil alam dalam skala besar dan dianggap sebagai perusak lingkungan. Sehingga dapat kita simpulkan nantinya bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia dalam penelitian ini.

Secara ringkas, hasil penelitian penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Nur Adila (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (study empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014)	Kepemilikan manajemen, Komisaris Independen, Profitabilitas, Tipe Industri dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	Regresi linier berganda	Tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , sedangkan variabel kepemilikan manajemen, komisaris independen dan profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
2	Syailendra Eka Saputra (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Size</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.	<i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Size</i> dan <i>Corporate Sosial Responsibility</i>	Regresi linier berganda	<i>Leverage</i> berpengaruh positif, Profitabilitas tidak berpengaruh positif, dan <i>Size</i> berpengaruh negatif terhadap jumlah pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i>

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Esti Rofiqkoh (2016)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	Regresi linier berganda	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sedangkan <i>leverage</i> dan <i>size</i> berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4	Siti Munsaidah, Rita Andini dan Agus Supriyanto (2016)	Analisis Pengaruh <i>Firm Size</i> , <i>Age</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Growth</i> Perusahaan Terhadap CSR pada Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2010-2014.	<i>Firm Size</i> , <i>Age</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Growth</i> Perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Regresi linier berganda	<i>Firm Size</i> , <i>Age</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial.
5	Ardiani Ika Sulistyawati, Rr. Lulus Prapti Nugroho Setiasih Surjanti, Dian Triyani (2016)	Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Pada Laporan Keuangan dan Determinasinya	Profitailitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen dan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Regresi linier berganda	terdapat pengaruh likuiditas, umur perusahaan, dewan komisaris independen terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> dan tidak terdapat pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap pengungkapan CSR.

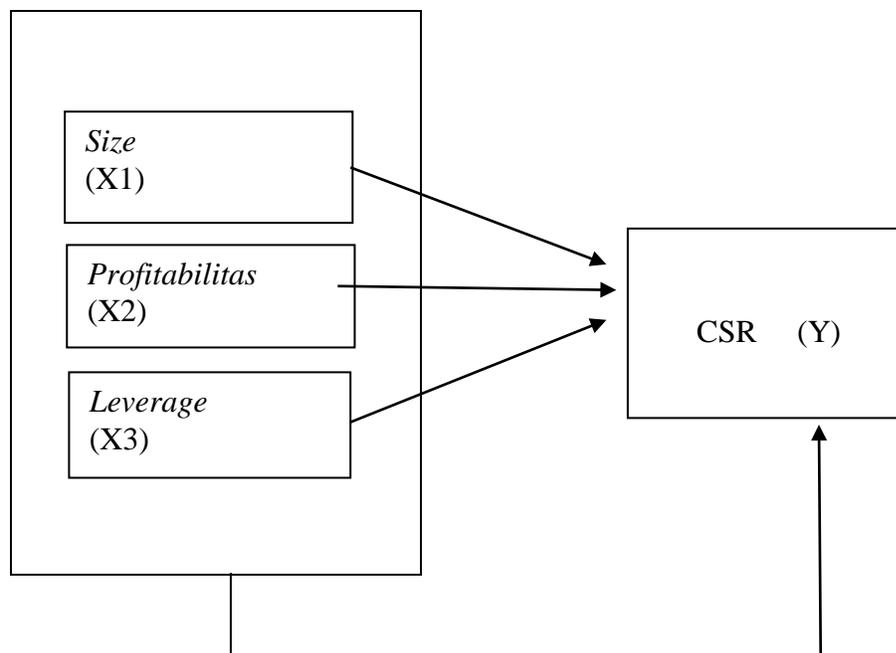
Sumber : dari berbagai jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran

Tinjauan terdahulu dan kajian teoritis serta permasalahan yang telah dikemukakan

merupakan dasar untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka tersebut dan merupakan uraian sementara dari permasalahan yang perlu pengujian kembali. Gambar dibawah merupakan kerangka pemikiran penelitian ini.

Gambar 2.3
Kerangka Model Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

1.) Pengaruh *Size*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Pengungkapan CSR Secara Simultan

Size menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar *size* suatu perusahaan maka semakin mendapat perhatian dari pasar maupun publik (Handayati, 2011). Heinze (1976) dalam Devina *et al.*, (2004) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program CSR secara lebih luas. *Leverage* menunjukkan kualitas layanan kewajiban perusahaan. Variabel ini menjelaskan seberapa besar rasio antara total kewajiban dengan total modal perusahaan. Perjanjian terbatas seperti perjanjian hutang yang tergambar dalam tingkat *leverage* dimaksudkan membatasi kemampuan manajemen untuk menciptakan transfer kekayaan antar pemegang saham dan pemegang obligasi (Fachry Maulana, 2013). Penelitian mengenai pengungkapan CSR perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah dkk.yang menguji Analisis Pengaruh *Firm Size*, *Age*, Profitabilitas, *Leverage* dan *Growth* Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Firm Size*, *Age*, Profitabilitas, *Leverage*, pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang akan diuji yaitu:

H1 : Diduga *size*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara.

2.) Pengaruh *Size*, *Profitabilitas* dan *Leverage* terhadap Pengungkapan CSR Secara Parsial.

Firm *size* umumnya dikaitkan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, sehingga CSR semakin luas. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. tingkat Profitabilitas dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan, oleh sebab itu semakin tinggi Profitabilitas suatu perusahaan. maka cenderung semakin luas *Corporate Social Responsibility*. *Leverage* menunjukkan kualitas layanan kewajiban perusahaan. Variabel ini menjelaskan seberapa besar rasio antara total kewajiban dengan total modal perusahaan. Penelitian secara parsial menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* telah banyak dilakukan dan hasilnya pun beragam. Seperti penelitian oleh Siti Munsaidah (2016) dengan hasil *size*, umur, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga *size*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara.